

**PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DIBAWAH BATAS  
MINIMUM MELALUI JUAL BELI DIKAITKAN DENGAN  
PENERAPAN LANDREFORM DI KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA**

**SAHRIAL AZHAR SIREGAR**

***ABSTRACT***

*The studied problems are factors cause the fragmentation of agricultural land under the minimum limit at Regency of Padang Lawas Utara. In addition to what a law consequence and efforts that influences the law enforcement on prohibition of fragmentation of agricultural land under the minimum limit by buying and selling related to the land reform application.*

*This research is conducted by empiric juridical approach, and the sample of this research is 48 persons from 16 villages at Regency of Padang Lawas Utara.*

*The fragmentation of agricultural land under the minimum limit by buying and selling caused by the necessity to the society on the urgent interest for their survival such as for medicine bill, educational fee, pay the debt, etc. Furthermore, it is important to review the regulation in which the minimum limit is 2 hectare can not be implemented in present.*

*Keywords : Minimum limit, Fragmentation, Agricultural land.*

## **I. Pendahuluan**

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkungan hukum adat, Hak Ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dengan kaca mata ekonomi, sehingga tepat apabila Perserikatan Bangsa-Bangsa mensinyalir bahwa saat ini masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi.<sup>1</sup>

Sekitar jutaan jiwa petani di Indonesia masih belum memiliki lahan pertanian atau mengandalkan dirinya sebagai buruh tani. Besarnya jumlah buruh tani tersebut sangat memprihatinkan karena bagaimana mungkin bisa sejahtera seorang petani jika tidak memiliki lahan pertanian.

Berdasarkan landasan politik hukum agraria Indonesia, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian sebagai pelaksana dari ketentuan diatas

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin Lubis. Abd Rahim Lubis., *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 26.

dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa hak menguasai Negara tersebut memberi wewenang untuk:<sup>2</sup>

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berkaitan dengan kewenangan Negara diatas, maka pemanfaatan tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mengatur pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah pertanian , Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 17 menentukan tentang batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian yang boleh dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau suatu keluarga, baik dengan hak milik atau hak-hak lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar seseorang (keluarga) dapat memiliki atau menguasai tanah pertanian tidak melebihi atau kurang dari ketentuan batas luas maksimum dan minimum, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup atau penghidupan bagi para petani.<sup>3</sup>

Dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap masalah pertanian di Indonesia telah menunjukkan bahwa penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam masyarakat, dimana ada sekelompok kecil dari masyarakat memiliki atau menguasai tanah secara berlebihan dan melampaui batas sedangkan dipihak lain sebagian kelompok dari masyarakat memiliki atau menguasai tanah dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu dibawah batas minimum pemilikan tanah dan bahkan banyak pula yang tidak mempunyai tanah sama sekali, terpaksa hidup sebagai buruh tani yang senantiasa hidup dibawah garis kemiskinan yang sifatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Hal ini juga sangatlah bertentangan dengan tujuan dari penerapan *landreform* yang diimplmentasikan di Indonesia sejak tahun 1960, dimana tujuan *landreform*

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 229-230.

<sup>3</sup> Upik Hamidah, "Pelaksanaan Penetapan Batas Tanah Pertanian Setelah Diberlakukannya UU No. 56 Prp Tahun 1960", *Justisia*, No. 16 Th. V 1997.

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria V*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm 14.

diIndonesia dalam pidato Menteri Agraria Soedjarwo pada tanggal 12 September 1960 adalah;

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber panghidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisasi keadilan sosial.
2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani (*land to the tillers*) agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial, suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak privat bezit yaitu hak milik sebagai hak yang kuat, bersifat perorangan, dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial.
4. Untuk mengakhiri sistem tuan-tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk setiap keluarga, selanjutnya kepada keluarga dapat laki-laki ataupun perempuan.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menyebutkan bahwa: “pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar, baik untuk sawah maupun untuk lahan kering”. Sehubungan adanya penetapan batas minimum dua hektar maka diadakan larangan untuk menjual, membagi-bagikan atau memisah-misahkan tanah yang sudah ada sehingga menimbulkan berlangsungnya pemilikan hak atas tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar.”

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 menyebutkan sebagai berikut: “Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian karena pewarisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan tersebut tidak berlaku kalau penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan tanah itu dijual sekaligus”.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya dibawah batas minimum dua hektar kecuali karena pembagian warisan dilarang. Namun pada hakekatnya masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, hal ini sering dilakukan oleh petani diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemilikan tanah pertanian di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak lagi yang dibawah 2 hektar setiap petani sekeluarga, dan bahkan yang tidak mempunyai tanah sama sekalipun masih banyak didapati. Jika pemecahan tanah tersebut masih tetap terjadi dilakukan oleh masyarakat bukan tak mungkin tanah yang sudah ada tersebut akan mengakibatkan timbulnya bagian-bagian yang lebih kecil lagi.

Pada dasarnya hal itu sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena bagaimana mungkin masyarakat mau jika tanah yang mereka miliki semakin habis. Pasti ada alasannya mengapa masyarakat tetap melakukannya, dimana kebanyakan mereka melakukan itu adalah karena keadaan ekonomi yang mendesak hanya itulah jalan satu-satu yang harus dilakukan dengan menjual sebagian dari tanah mereka.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana akibat hukum atas terjadinya pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan *landreform* di Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana upaya-upaya yang mempengaruhi penegakan hukum tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan *landreform* di Kabupaten Padang Lawas Utara?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas terjadinya pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan *landreform* di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang mempengaruhi penegakan hukum tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan *landreform* di Kabupaten Padang Lawas Utara.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat tentang pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan *landreform*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah maupun majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Seterusnya dilakukan penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara dengan berbagai elemen masyarakat dan pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan pemecahan tanah pertanian yang luasnya dibawah batas minimum pemilikan tanah pertanian melalui jual-beli di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun subyek yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah dari Kabupaten tersebut diambil 4 kecamatan, dan dari masing-masing kecamatan yang terpilih sebagai sampel tersebut diambil 4 desa sebagai sampel, jadi jumlah desa sampel seluruhnya ada 16 desa, dari masing-masing desa diambil 3 orang warga yang melakukan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual-beli. Sehingga sampel yang diambil adalah 48 warga masyarakat.

Selain itu, untuk melengkapi data dalam penelitian ini juga dipilih narasumber antara lain:

- a) Kepala Desa/Lurah dari beberapa sampel.
- b) Tokoh masyarakat yang ada disetiap sampel.
- c) PPAT dan Camat setiap kecamatan Sampel.
- d) Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian yang dimaksud dengan tanah dalam pasal diatas adalah permukaan bumi.

Selanjutnya untuk tanah pertanian, dimana dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tidak diberikan penjelasan apakah yang dimaksud dengan tanah pertanian, sawah dan tanah kering, namun didalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari Tahun 1961 Nomor: Sekra 9/1/12 memberikan penjelasan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan tanah pertanian adalah semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas tanah negara dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak”.

Pada umumnya tanah pertanian adalah “semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa luas yang merupakan tanah pertanian”.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam hal pemilikan/penguasaan tanah pertanian telah mengalami ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat tani yang jauh berbeda pendapatan antara tuan-tuan tanah dengan petani-petani kecil. Hal ini mengakibatkan para petani menuntut agar diadakan pemerataan pemilikan /penguasaan tanah pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian untuk membatasi pemilikan / penguasaan tanah pertanian yang dapat dipunyai oleh seseorang atau sekeluarga. Sebab tanpa adanya pembatasan tersebut dikhawatirkan ketimpangan-ketimpangan serta pemerasan-pemerasan yang disebabkan oleh tanah terus berlangsung.

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), maka perlu diadakan larangan yang membatasi pemilikan/penguasaan tanah yang melampaui batas.

Atas dasar ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

---

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 372.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-Undang Pokok Agraria didalam Pasal 7 menyebutkan “untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”.

Pemilikan tanah yang melampaui batas jelas sangat merugikan kepentingan umum, sebab dengan bertumpuknya tanah berhektar-hektar pada seseorang berarti pemerataan dibidang pemilikan dan penguasaan tanah tidak ada. Dengan demikian berarti juga tidak ada pemerataan hasil dari tanah yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan satu keluarga bersama-sama kepunyaan orang lain, yang jumlahnya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini ayat (2)”.

Berdasarkan hasil sensus pertanian, pada tahun 1963, rata-rata luas tanah pertanian rakyat adalah 1,05 hektar untuk seluruh Indonesia. Penelitian pada tahun 1993 pemilikan tanah pertanian secara nasional rata-rata seluas 0,83 hektar per keluarga petani, didaerah jawa bahkan lebih kecil lagi sekitar 0,41 hektar, “sedangkan jumlah keluarga petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar diperkirakan mencapai 7 juta keluarga”.<sup>6</sup>

Berpatokan pada data tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa setiap tahun pemilikan tanah oleh petani semakin menyempit dan bisa diprediksikan kondisi kepemilikan tanah yang akan datang petani, petani kecil dan buruh tani akan semakin tidak mungkin untuk memiliki tanah pertanian yang cukup untuk hidup layak.

Untuk mempertinggi taraf hidup para petani kepada mereka perlu diberikan tanah garapan yang cukup luasnya. Oleh karena itu maka Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria selain menetapkan luas maksimum, menghendaki juga luas minimumnya. Batas minimum pemilikan tanah pertanian adalah merupakan program *landreform* yang paling sulit dilaksanakan dari berbagai program *landreform* lainnya. Dimana penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil akan menjadi masalah sosial,

---

<sup>6</sup> IGN Guntur, *Proses Pergeseran Pola Kepemilikan dan Penguasaan tanah Pertanian* , (Jakarta: Bhumi Nomor 4, 2003), hlm. 11.

hukum, ekonomi maupun masalah lainnya di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, selain ditentukan penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, juga dikehendaki agar ada pengaturan luas minimum penguasaan tanah pertanian oleh seseorang atau sekeluarga. Maksud ditetapkannya pembatasan luas minimum penguasaan tanah pertanian adalah agar petani yang bersangkutan mendapat penghasilan yang cukup atau layak untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya.

Berdasarkan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, penetapan batas minimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian seluas 2 hektar untuk tanah sawah atau tanah pertanian kering. Agar batas minimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian seluas 2 hektar itu tercapai, maka konsekuensinya adalah pemecahan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang luasnya kurang dari 2 hektar dilarang, ketentuan larangan ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960.

Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) mengatur bahwa seseorang atau sekeluarga yang memiliki tanah pertanian seluas 2 hektar atau kurang dari 2 hektar tidak dibolehkan mengalihkan tanahnya sebagian karena dengan demikian timbul pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar. Jika dikehendaki untuk dialihkan haruslah semuanya, baik kepada seseorang atau lebih dengan ketentuan, bila dialihkan kepada lebih dari seseorang, maka mereka yang menerima pengalihan hak itu masing-masing harus sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2 hektar, atau dengan pengalihan itu masing-masing harus memiliki paling sedikit 2 hektar.

Dalam hal pemilikan tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar, larangan tersebut berlaku pula apabila dengan pengalihan itu mengakibatkan timbulnya bagian atau bagian-bagian yang luasnya kurang dari 2 hektar. Pengalihan tersebut untuk sebagian dibolehkan jika sisa yang tidak dialihkan itu luasnya paling sedikit 2 hektar.

Konsekuensi lainnya diatur dalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Dalam pasal tersebut ditentukan, apabila setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 ada tanah yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka dalam waktu satu tahun wajib menunjuk salah seorang diantaranya yang



selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain yang telah mempunyai tanah pertanian seluas 2 hektar, atau dengan penerimaan itu tanah yang dimilikinya luasnya minimum 2 hektar.

Apabila kewajiban memindahkan tanah tersebut tidak dilaksanakan, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pejabat yang ditunjuk, menunjuk salah seorang diantara mereka itu yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan atau menyerahkannya pada pihak lain.

Pengecualian dari ketentuan dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 adalah peralihan hak karena pewarisan tanah pertanian. Pengecualian ini dimaksudkan sebagai penghargaan dan penghormatan kepada pemilik tanah yang hendak menggunakan hukum agamanya masing-masing dalam upaya membagi tanah warisan.

Peralihan hak atas tanah khususnya tanah pertanian banyak terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, peralihan hak atas tanah pertanian tersebut dilakukan dengan cara sekaligus dan juga dilakukan dengan pemecahan. Pemecahan tanah pertanian tersebut dilakukan terhadap tanah yang belum bersertifikat dan juga tanah yang sudah bersertifikat. Untuk tanah yang belum bersertifikat biasanya peralihan haknya dilakukan secara dibawah tangan, sedangkan untuk tanah yang sudah bersertifikat dilakukan melalui izin pemindahan hak atas tanah pertanian yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hasil penelitian lapangan yang peneliti laksanakan, cukup banyak terdapat peralihan hak atas tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1) khususnya terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat. Menurut keterangan PPAT di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, peralihan hak atas tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1) rasanya masih sangat sulit untuk dikendalikan, karena para pemilik tanah menganggap bahwa tanah miliknya itu benar untuk dijual belikan asalkan tidak merugikan orang lain.

Terjadinya penjualan tanah pertanian sebagian yang terjadi dimasyarakat disebabkan karena kepentingan-kepentingan yang mendesak untuk kelangsungan hidup mereka sendiri dan sisanya masih tetap bisa diolah untuk anak cucunya kelak. Disemua desa yang diteliti (16 desa) yang tersebar di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara telah terjadi jual beli tanah pertanian sebagian yang memang sulit untuk dikendalikan oleh aparat desa. Bahkan banyak diantara mereka yang melakukan jual beli hanya cukup dengan alat bukti sebuah segel atau kwitansi, selanjutnya dilaporkan

ke pihak desa, dengan demikian secara tidak langsung Kepala Desa telah ikut menyaksikan jual beli tersebut.

Banyaknya kasus peralihan hak atas tanah pertanian sebagian melalui jual beli di masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara mengakibatkan terjadinya pelanggaran Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Terjadinya pelanggaran tersebut karena ada beberapa alasan yang menurut pemilik (penjual) merupakan suatu keterpaksaan untuk melakukannya. Adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Untuk biaya berobat.

Kesehatan adalah segala-galanya, apapun akan dilakukan demi kesehatan termasuk menjual sebagian tanah yang dimiliki.

b. Untuk membiayai pendidikan.

Sudah sering kita jumpai di masyarakat bahwa didalam kehidupan modern seperti sekarang ini, banyak sekali orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan anak-anaknya, agar nantinya mendapatkan masa depan yang lebih baik. Orang tua rela untuk melakukan segala usaha (termasuk menjual tanah pertaniannya) demi pendidikan anak-anaknya.

c. Untuk membayar hutang.

Seseorang melakukan penjualan tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1) tersebut kebanyakan karena kebutuhan yang mendesak termasuk juga untuk membayar hutang. Bahkan sering dapat dijumpai bahwa tanah tersebut sudah dikuasai terlebih dahulu oleh orang yang memberi hutang, sehingga sulit untuk menghindari penjualan tanahnya.

d. Untuk Modal Usaha

Tidak selamanya usaha dalam bidang pertanian selalu memperoleh keuntungan, ada kalanya para petani mengalami kerugian, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu melakukan suatu usaha yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dari pada bertani (seperti usaha dagang), akhirnya mereka menjual tanah pertanian sebagian untuk mendapatkan modal usaha tersebut, dan sisanya untuk diberikan kepada anak cucu mereka kelak.

e. Untuk biaya naik haji.

Bagi orang-orang yang fanatik, kebutuhan rohani adalah merupakan yang terpenting untuk dilaksanakan, walaupun naik haji adalah kewajiban bagi ummat

islam yang mampu, demi kabutuhan batin mereka rela menjual tanahnya sebagian demi untuk mencukupi biayanya naik haji.

f. Untuk dibelikan tanah kembali.

Terkadang tanah pertanian yang mereka miliki kurang mencukupi kesuburannya, dimana mereka berkeinginan untuk mendapatkan tanah yang lebih baik untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Terkadang juga untuk mendapatkan tanah yang lebih dekat dari tempat dimana mereka tinggal.

Keterangan diatas disusun berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual tanah pertanian sebagian. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebutlah, serta beberapa pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan sosial lainnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas Utara mengambil langkah-langkah kebijakan agar peralihan hak (jual beli) tanah pertanian tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, yaitu dengan cara memberikan dispensasi (izin khusus) pada peralihan hak tersebut. Setelah mendapatkan dispensasi tersebut, mereka meneruskan peralihan hak (jual beli) tersebut ke PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk dibuatkan aktanya dan selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk dibuatkan sertifikat hak atas tanahnya.

Camat Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa “jual beli tanah pertanian yang melanggar Pasal 9 ayat (1) di Kecamatan Portibi banyak terjadi, yang biasanya dilakukan secara dibawah tangan dan bahkan tidak diketahui / dilaporkan pada Kepala Desa setempat”.<sup>7</sup> Mereka tidak sadar bahwa jual beli tersebut akan mengandung masalah atau konflik di kemudian hari, dan mereka umumnya melakukan jual beli tanah pertanian tersebut untuk keperluan berobat, biaya sekolah, membayar hutang dan lain-lain.

Demikian juga Camat Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat (1) sudah biasa terjadi, dimana sebagian masyarakat tidak mengetahui atas ketentuan Undang-undang tersebut dan bahkan masyarakat umumnya sudah tidak peduli lagi terhadap ketentuan tersebut”.<sup>8</sup>

Selanjutnya Notaris / PPAT Kabupaten Padang Lawas Utara juga mengatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), “rasanya sangat sulit ,

---

<sup>7</sup> Haholongan Siregar, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Camat Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara), 04 Januari 2012.

<sup>8</sup> Tunggul.P, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Camat Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara), 03 Januari 2012.

terutama untuk daerah pedesaan, karena kebanyakan mereka belum mengerti terhadap ketentuan tersebut, walaupun mengerti jika mereka terdesak oleh kebutuhan ekonomi mereka tidak peduli dengan ketentuan tersebut”.<sup>9</sup>

Menurut A.P Parlindungan “*fragmentasi* tanah pertanian karena pewarisan masih ditolerir, walaupun justru karena pewarisan inilah yang terbanyak terjadi *fragmentasi* oleh karena setiap petani boleh dikatakan mempunyai anak dan ini yang merusuhkan pemerintah karena langsung saja banyak petani-petani gurem yang timbul di Indonesia”.<sup>10</sup>

Sanksi bagi yang melanggar larangan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yaitu “Barang siapa melanggar larangan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat (2) dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak Rp 10.000,00”.

Dalam prakteknya larangan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut sering kali menjumpai kesulitan, “jika seorang petani memiliki tanah pertanian kurang dari 2 hektar dan yang akan dijualnya hanya sebagian, karena ia ingin tetap menjadi petani, sedangkan uang yang diperlukannya hanyalah sebesar harga sebagian dari tanahnya tersebut”<sup>11</sup>.

Tetapi jika petani tersebut menjual sebagian dari tanahnya yang sisanya masih cukup 2 hektar, dalam hal ini tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) tersebut, dengan catatan jika penerima atau pembeli tanah tersebut memiliki tanah pertanian minimal 2 hektar setelah ditambah dengan tanah yang akan dibelinya itu. Selain daripada itu sering juga diberikan dispensasi terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1), bilamana tanah-tanah yang bersangkutan diperlukan untuk proyek-proyek yang penting.

Seseorang melakukan pemindahan hak (jual beli) atas tanah pertanian yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 56. Prp Tahun 1960 adalah sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah intern yang harus ditangani mereka sendiri demi tercapainya tujuan yang hendak mereka capai walaupun tindakan itu menyimpang dari peraturan. Kenyataan tersebut merupakan sebagai tindakan yang dilematis. Di satu pihak mereka harus tunduk pada ketentuan

---

<sup>9</sup> Fauziah Hamni, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Notaris Padang Lawas Utara), 08 Januari 2012.

<sup>10</sup> A.P Parlindungan, *Landreform di Indonesia Suatu Study Perbandingan*, (Bandung: Mandar Maju, 1991). Hlm. 107.

<sup>11</sup> Boedi Harsono, *Op Cit*, hal. 374.

hukum yang sifatnya normatif. Di pihak lain, kenyataan dilapangan yang begitu kompleks sering tidak bisa ditangani dan ditampung oleh peraturan yang begitu kaku”.<sup>12</sup>

Tercapainya penegakan hukum juga tidak terlepas dari peran pemerintah itu sendiri dalam suatu upaya penegakan hukum. Pemerintah sebagai roda pemerintahan adalah induk dari para penegak hukum (kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan), yang sangat besar pengaruhnya untuk tercapainya penegakan hukum. Dalam usaha penegakan hukum, pemerintah tentunya mempunyai suatu sistem yang akan diterapkan oleh para penegak hukum dalam peranannya masing-masing.

Pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli yang terjadi di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah suatu hal yang sudah biasa terjadi ditengah-tengah kalangan masyarakat, seakan-akan tidak ada satupun undang-undang yang mengaturnya. Bahkan sebagian besar dari masyarakat sama sekali tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut, sesuai dengan pernyataan dari salah satu warga masyarakat mengatakan bahwa “Pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli tersebut selama ini sudah terbiasa dilakukan, seandainyaupun pemerintah mengetahuinya selama ini tidak pernah ada dipermasalahkan”.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, “dari sekian banyak responden (kalangan masyarakat) yang telah di wawancarai sangat jarang didapat ada warga masyarakat yang mengetahui Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum”,<sup>14</sup> selain dari itu masyarakat juga ada yang beranggapan bahwa “undang-undang yang mengatur tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum tersebut sudah tidak diberlakukan lagi”.<sup>15</sup>

Pelanggaran yang telah dilakukan terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut juga berpengaruh dari lemahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, karena di dukung oleh lemahnya

---

<sup>12</sup> J. Kartini Soejendro, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang berfotensi Konflik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001). hlm. 26.

<sup>13</sup> Syahrannuddin Siregar, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Warga Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara), 06 Januari 2012.

<sup>14</sup> Suhunan, ed., ( Padang Lawas Utara: Wawancara dengan 12 Responden Warga Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara), 06 - 08 Januari 2012.

<sup>15</sup> Azhari Pane, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Warga Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara), 06 Januari 2012.

sosialisasi terhadap Undang-Undang tersebut yang dilakukan oleh pemerintah setempat, dimana masih ada sebahagian masyarakat yang tidak tahu menahu akan larangan tersebut, bagi mereka tanahnya adalah tanah mereka sendiri (haknya), mau dengan cara yang bagaimana dia menjual tanah tersebut adalah haknya sendiri, yang penting adalah kesepakatan kedua belah pihak antara sipembeli dengan sipenjual atas objek tanah tersebut dengan tidak mempertimbangkan peraturan pertanahan yang ada. Apalagi jika masyarakat sedang terdesak oleh kebutuhan ekonomi, maka dengan cara yang bagaimanapun akan ditempuh supaya tanahnya tersebut bisa terjual.<sup>16</sup>

Demikian berdasarkan hasil wawancara dari salah satu warga masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang menyatakan bahwa “tanah ini memang tanah kami sendiri kami bebas melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah kami, jika kami terhempit akan kebutuhan yang mendesak apa pemerintah juga bisa mengatasi?”.<sup>17</sup> Selain dari itu terhadap masyarakat khususnya di daerah pedesaan masih sangat rendah pengetahuannya terhadap hukum, dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan hampir seluruh warga masyarakat di daerah pedesaan tidak mengetahui dan memahami tentang Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum tersebut.

Begitu juga Camat Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara juga mengatakan “Penyuluhan hukum terhadap masyarakat khususnya masyarakat pedesaan masih sangat penting untuk dilakukan”.<sup>18</sup> Dengan penyuluhan hukum tersebut dan jenis lainnya dapat memungkinkan akan membuat masyarakat lebih peduli terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

Berdasarkan dari uraian tersebut sudah jelaslah dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Padang Lawas Utara belum dapat tercapai. Merujuk pada isi dari pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak lagi menjadi hukum apabila tidak diterapkan”.<sup>19</sup> Hal ini member arti bahwa

---

<sup>16</sup> Ahmad Harahap, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Warga Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara), 06 Januari 2012.

<sup>17</sup> Ahmad Harahap, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Warga Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara), 06 Januari 2012.

<sup>18</sup> Tunggul.P, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Camat Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara), 03 Januari 2012.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, .....). Hal 5.

suatu aturan hukum yang tidak ditegakkanakan menjadi mati suri sampai suatu waktu hukum itu ditinggalkan dan dilupakan sehingga hilang dan mati dalam arti yang sesungguhnya. Dengan begitu penegakan hukum adalah bagian yang menentukan suatu aturan itu tetap menjadi hukum atau tidak.

Selama aturan hukum itu tidak dijalankan, maka ia tidak lebih dari hasil pemikiran para pembuat undang-undang yang terangkai dalam kata-kata yang indah namun tidak punya makna dan arti sama sekali di tengah masyarakat sebab tidak ada pengamalannya. Untuk bisa hukum itu menjadi eksis di tengah masyarakat dan teramalkan, maka upaya penegakan hukumlah solusinya.

Hal serupa juga terjadi pada aturan-aturan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Jika tidak ada upaya penegakan hukumnya, maka aturan-aturan tersebut tidak lebih dari sebuah konsep pemikiran yang baik dan ideal tanpa ada realisasinya yang nyata dalam masyarakat.

Untuk itu dalam hal ini yang diharapkan adalah peranan pemerintah sebagai yang menjalankan roda pemerintahan untuk dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah merupakan salah satu instansi terkait haruslah benar-benar bekerja dan mengambil suatu tindakan yang konkrit untuk menerapkan peraturan yang berlaku agar tercapainya penegakan hukum tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli khususnya di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam menerapkan Undang-Undang tersebut khususnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1) ini bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Tentunya Badan Pertanahan Nasional (BPN) pasti mendapatkan berbagai kendala dalam hal ini term asuk mengenai tenaga, waktu dan juga biaya yang bukan dalam jumlah yang sedikit.

Dimana Indonesia adalah merupakan negara agraris yang mempunyai begitu luas lahan pertanian termasuk di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena luas lahan pertanian tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan jumlah tenaga yang seperti sekarang ini masih sulit untuk mengatasinya, sesuai dengan pendapat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan yang menyatakan bahwa: “untuk mencapai penegakan hukum tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 masih sangat sulit untuk dilakukan terkait masalah tenaga dan dana

yang dibutuhkan”<sup>20</sup>, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) haruslah mempunyai data kepemilikan lahan-lahan pertanian secara keseluruhan dari masing-masing anggota masyarakat, dan hal itulah yang sangat sulit untuk dilakukan.

Selain itu juga jika dilihat dari luas lahan yang tersedia sekarang ini dibandingkan dengan jumlah penduduk yang semakin padat dimana batas minimum 2 hektar tersebut perlu ditinjau kembali oleh pemerintah. Begitu juga sekarang ini zamannya para tuan-tuan tanah semakin berlomba-lomba untuk memperluas lahan-lahannya masing-masing, dimana tanah pertanian tersebut adalah suatu investasi yang sangat menjanjikan buat mereka, sementara itu jika sudah sampai tanah-tanah tersebut pada tangan mereka sudah sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Dengan demikian para petani penggarap akan semakin susah untuk mendapatkan tanah garapan kembali walaupun sekiranya mereka mempunyai uang yang cukup untuk membeli sebidang tanah. Maka dari itu jika untuk menegakkan batasan minimum pemilikan tanah pertanian dalam hal ini pemerintah juga harus menegakkan batas maksimum pemilikan tanah pertanian juga.

Selain itu hak lain atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) yang masih diterbitkan oleh pemerintah, yang mana kadang kala posisi Hak Guna Usaha (HGU) tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, dimana terkadang posisi Hak Guna Usaha (HGU) tersebut berada berada ditengah-tengah pemukiman penduduk, dengan demikian para penduduk akan sangat kekurangan terhadap tanah pertanian, yang akhirnya para petani penggarap hanyalah sebagai buruh didalamnya atau mencari pekerjaan lain ke daerah perkotaan.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah karena keterpaksaan terhadap warga masyarakat atas kepentingan-kepentingan yang mendesak untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, dan sisanya masih bisa diolah untuk anak cucu mereka. Dalam hal ini sebagian besar dari masyarakat tidak menyadari bahwa hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1). Adapun yang menjadi alasan-alasan pemilik tanah

---

<sup>20</sup> Aladin Harahap, (Padang Lawas Utara: Wawancara dengan Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan), 12 Desember 2011.



untuk menjual tanahnya yang menurutnya sendiri adalah suatu keterpaksaan untuk melakukannya adalah karena untuk biaya berobat, biaya pendidikan, membayar utang, modal usaha, naik haji dan lain sebagainya.

2. Akibat hukum atas terjadinya pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan Landrefrom di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak Rp 10.000,00, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.
3. Upaya-upaya yang mempengaruhi tercapainya penegakan hukum tidak terlepas dari peraturan itu sendiri apakah diterima pada masyarakat atau tidak, ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56. Prp Tahun 1960 tersebut adalah suatu ketentuan yang menurut pembuat undang-undang merupakan sesuatu yang ideal bagi para petani, namun ketentuan tersebut sangatlah sulit untuk dilaksanakan, karena batas minimum 2 hektar untuk saat sekarang ini sudah sulit untuk diterapkan sehingga perlu ditinjau kembali undang-undang tersebut.

Selanjutnya kesadaran hukum yang tertanam didalam hati sanubari masyarakat sangatlah mempengaruhi tercapainya penegakan hukum, dimana sebagian masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara tidak peduli akan larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum tersebut, bagi mereka tanahnya adalah tanah mereka sendiri (haknya), mau dengan cara yang bagaimana dia menjual tanah tersebut adalah haknya sendiri, yang penting adalah kesepakatan kedua belah pihak antara sipembeli dengan sipenjual atas objek tanah tersebut dengan tidak mempertimbangkan peraturan pertanahan yang ada.

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah:

1. Tanah pertanian sebagian besar berada pada daerah pedesaan, dimana perlu disadari bahwa sebagian besar dari masyarakat pedesaan masih begitu awam dan juga para petani masih rendah pendidikannya, oleh karena itu perlu kiranya memberikan semacam penyuluhan hukum pada masyarakat petani akan pentingnya peraturan perundang-undangan itu ditegakkan khususnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1), atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Landreform, dimana landreform itu dibuat adalah ditujukan untuk masyarakat petani.

2. Apabila Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1) masih tetap akan dilaksanakan, maka perlu kiranya dibuat lagi peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan hak-hak seseorang dan begitu juga keadaan luas lahan pertanian masa sekarang ini maupun masa akan datang.
3. Kiranya perlu ditinjau lagi Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1) tersebut, dimana batas untuk 2 hektar saat sekarang ini sudah sulit untuk dimiliki oleh petani sekeluarga apalagi pada daerah pulau Jawa, selain dari itu diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi terkait dalam hal ini agar tidak memberikan peluang terhadap masyarakat untuk memecah tanah pertanian dibawah batas minimum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1).

## V. Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria seri Hukum Agraria V*. Bandung: Alumni, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Akademika Prasindo, 1985.
- Dalimunthe, Chadidjah. *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*. Medan: USU-Press, 1998.
- Guntur, IGN. *Proses Pergeseran Pola Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian*. Jakarta: Bhumi Nomor 4, 2003.
- Hamidah, Upik. *Pelaksanaan Penetapan Batas Tanah Pertanian Setelah Diberlakukannya UU No. 56 Prp Tahun 1960*, Jakarta: Justisia, 1997.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Analisa Hukum Agraria*. Jakarta: Essa Study Club, 1986.
- Lubis, Muhammad, Yamin. Abd, Rahim Lubis. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Parlindungan, A.P. *Landreform di Indonesia Study Perbandingan*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Aneka Hukum Agraria*: Bandung: Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1993.

- Perangin, Effendi. *Praktek Jual Beli Tanah*. Jakarta: CV Rajawali. 1987.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. 1996.
- Soemardjan, Selo. *Land Reform in Indonesia*. Jakarta: Asian Survey, 1962.
- Soejendro, J. Kartini. *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia.